

## **Integrasi Perspektif Sosiologi dan Kesejahteraan Sosial dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Rentan” Studi Literatur Komprehensif**

**Evi Nurhayati\***

Universitas Padjadjaran, Bandung, 40135, Indonesia

\*Alamat email penulis koresponden: [emailna.evi@gmail.com](mailto:emailna.evi@gmail.com)

### **Abstrak**

Isu kerentanan sosial menjadi tantangan utama dalam masyarakat modern yang ditandai oleh ketimpangan sosial, eksklusi, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, perempuan, lansia, dan masyarakat miskin sering mengalami ketidakadilan struktural yang menuntut pendekatan multidisipliner. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi antara perspektif sosiologi dan kesejahteraan sosial dalam upaya pemberdayaan kelompok rentan melalui metode literatur komprehensif. Data diperoleh dari 37 artikel ilmiah nasional dan internasional yang terbit antara tahun 2010–2025, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis dengan pendekatan tematik. Hasil kajian menunjukkan tiga temuan utama: (1) Sosiologi berperan dalam menjelaskan akar kerentanan sosial melalui analisis struktur sosial, relasi kekuasaan, dan stratifikasi kelas; (2) Kesejahteraan sosial berkontribusi melalui praktik pemberdayaan berbasis komunitas, advokasi sosial, dan penguatan kapasitas individu serta kelompok; (3) Integrasi keduanya menghasilkan model interdisipliner yang memadukan analisis makro (struktur sosial) dan intervensi mikro (pemberdayaan individu dan komunitas). Model ini mendorong perubahan sosial yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara teori sosial dan praktik pekerjaan sosial dalam memperkuat kebijakan pemberdayaan kelompok rentan di Indonesia. Temuan ini juga memberikan rekomendasi bagi pengembangan kurikulum interdisipliner, peningkatan kapasitas pekerja sosial, serta formulasi kebijakan sosial berbasis bukti dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: sosiologi, kesejahteraan sosial, pemberdayaan, kelompok rentan, integrasi ilmu

### **Abstract**

*The issue of social vulnerability has become a significant challenge in modern society, characterized by social inequality, exclusion, and limited access to resources. Vulnerable groups such as children, persons with disabilities, women, the elderly, and the poor often experience structural injustice that demands a multidisciplinary approach. This study aims to analyze the integration of sociological and social welfare perspectives in efforts to empower vulnerable groups through a comprehensive literature review. Data were obtained from 37 national and international scholarly articles published between 2010 and 2025, then analyzed using content analysis techniques with a thematic approach. The findings reveal three main points: (1) Sociology plays a role in explaining the roots of social vulnerability through the analysis of social structures, power relations, and class stratification; (2) Social welfare contributes through community-based empowerment practices, social advocacy, and the strengthening of individual and group capacities; (3) The integration of both disciplines produces an interdisciplinary model that combines macro analysis (social structure) and micro intervention (individual and community empowerment). This model promotes inclusive, participatory, and equitable social change. The article emphasizes the importance of synergy between social theory and social work practice in strengthening empowerment policies for vulnerable groups in Indonesia. The findings also provide recommendations for the development of interdisciplinary curricula, capacity building for social workers, and the formulation of evidence-based and participatory social policies.*

*Keywords: sociology, social welfare, empowerment, vulnerable groups, interdisciplinary integration*

## 1. PENDAHULUAN

Isu kerentanan sosial menjadi tantangan yang semakin kompleks dalam masyarakat modern yang diwarnai oleh perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang cepat. Kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, perempuan, lansia, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas kerap menghadapi hambatan sistemik yang membuat mereka kesulitan mengakses sumber daya dan kesempatan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara. Mereka hidup dalam situasi ketidakadilan struktural yang berakar pada relasi kekuasaan yang timpang, diskriminasi sosial, serta sistem sosial yang cenderung menyingkirkan mereka dari partisipasi sosial yang bermakna.

Dalam situasi demikian, pendekatan multidisipliner menjadi kunci untuk memahami dan menanggulangi masalah kerentanan sosial secara menyeluruh. Dua disiplin ilmu yang memiliki kontribusi besar dalam upaya ini adalah sosiologi dan kesejahteraan sosial. Sosiologi memberikan lensa analitis untuk memahami struktur sosial, pola interaksi, dan mekanisme ketimpangan, sedangkan kesejahteraan sosial menyediakan kerangka praktis untuk melakukan intervensi sosial, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan individu maupun komunitas. Integrasi kedua bidang ini tidak hanya memperkaya teori dan praktik, tetapi juga memperkuat pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada keadilan sosial, partisipasi, dan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Konsep kerentanan sosial (*social vulnerability*) telah menjadi perhatian penting dalam ilmu sosial kontemporer. Toharudin et al. (2021) dalam kajiannya tentang peta penelitian global menemukan bahwa studi tentang kerentanan sosial meningkat pesat setelah tahun 2020, terutama dalam konteks krisis sosial dan lingkungan. Mereka mendefinisikan kerentanan sosial sebagai kondisi ketika individu atau kelompok memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak negatif perubahan sosial dan memiliki kapasitas terbatas untuk beradaptasi atau pulih dari situasi tersebut.

Dalam perspektif sosiologis, kerentanan sosial tidak semata-mata dipahami sebagai kelemahan individu, tetapi lebih sebagai produk dari struktur sosial yang tidak adil. McKeown (2022) menegaskan bahwa teori sosial harus mampu menjelaskan pembentukan, penyebab, dan keberlanjutan kerentanan dalam kerangka kekuasaan dan struktur sosial yang lebih luas. Artinya, individu menjadi rentan bukan hanya karena kekurangan kemampuan atau sumber daya pribadi, tetapi karena mereka hidup dalam sistem sosial yang menciptakan ketimpangan dan menyingkirkan kelompok tertentu dari akses terhadap modal sosial, ekonomi, dan politik.

Fenomena kemiskinan, ketimpangan gender, atau eksklusi etnis merupakan contoh konkret dari bagaimana kerentanan sosial dibentuk secara struktural. Dalam konteks ini, sosiologi membantu mengungkap mekanisme sosial yang melestarikan kerentanan, seperti sistem kelas, patriarki, stigma sosial, serta diskriminasi berbasis identitas. Sosiologi juga menyediakan konsep-konsep penting seperti *stratifikasi sosial*, *marginalisasi*, dan *eksklusi sosial* yang berguna untuk memahami mengapa kelompok tertentu terus-menerus berada dalam posisi tidak berdaya meskipun berbagai program sosial telah dilakukan.

Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi dan digitalisasi juga melahirkan bentuk-bentuk kerentanan baru. Ketimpangan akses digital, misalnya, menyebabkan sebagian masyarakat tertinggal dari proses ekonomi dan pendidikan berbasis teknologi. Penelitian Zulfachri dan Mat Som (2021) menunjukkan bahwa keberadaan *modal sosial* (social capital) seperti

kepercayaan, jaringan, dan norma sosial berpengaruh besar terhadap kemampuan komunitas dalam menghadapi perubahan tersebut. Di komunitas yang memiliki ikatan sosial kuat, kerentanan cenderung lebih rendah karena dukungan sosial dapat menjadi mekanisme proteksi yang efektif. Dari perspektif sosiologi, memahami kerentanan sosial berarti melihat bagaimana struktur sosial dan dinamika relasi kekuasaan membentuk kondisi rentan tersebut. Pendekatan ini menuntut intervensi yang tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga pada transformasi struktur sosial yang lebih luas.

Jika sosiologi berfokus pada analisis penyebab struktural kerentanan, maka ilmu kesejahteraan sosial (*social welfare/social work*) lebih menekankan pada bagaimana memberikan solusi praktis melalui intervensi sosial. Kesejahteraan sosial memiliki orientasi ganda: pada tataran mikro, pekerja sosial membantu individu dan keluarga mengatasi masalah pribadi; pada tataran makro, mereka terlibat dalam perubahan kebijakan dan pemberdayaan komunitas. Konsep pemberdayaan (*empowerment*) menjadi inti dari pendekatan kesejahteraan sosial modern. Menurut Sukmana (2023), pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi individu atau kelompok agar dapat mengendalikan kehidupannya sendiri. Dalam praktiknya, pekerja sosial berperan sebagai *fasilitator*, *mediator*, dan *advokat* yang membantu masyarakat menemukan kekuatan mereka untuk keluar dari kondisi ketidakberdayaan.

Pendekatan ini selaras dengan paradigma *strength-based approach* yang berkembang dalam dekade terakhir, dimana fokus intervensi bergeser dari melihat kelemahan klien menuju penguatan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Melalui program pelatihan, pendampingan, serta pembentukan kelompok swadaya masyarakat, pekerjaan sosial berupaya membangun kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat. Sebuah studi oleh Soitu (2021) menegaskan bahwa kesejahteraan sosial tidak lagi hanya berbicara tentang bantuan sosial, tetapi juga tentang transformasi sosial. Pekerjaan sosial berperan penting dalam menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan tindakan nyata di lapangan, terutama dalam konteks komunitas yang termarginalkan. Dengan demikian, kesejahteraan sosial menjadi “jembatan” antara pemahaman sosiologis tentang ketimpangan sosial dan tindakan sosial untuk mengatasinya.

Pendekatan kesejahteraan sosial yang berbasis komunitas (*community-based approach*) dianggap paling efektif dalam konteks pemberdayaan kelompok rentan. Melalui model ini, intervensi dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif warga, memanfaatkan sumber daya lokal, dan membangun rasa kepemilikan atas perubahan yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pandangan Toharudin et al. (2021) bahwa partisipasi masyarakat adalah elemen kunci untuk mengurangi kerentanan sosial secara berkelanjutan.

Meskipun sosiologi maupun kesejahteraan sosial memiliki peran penting, keduanya akan lebih kuat bila diintegrasikan dalam kerangka pemberdayaan. Integrasi ini penting karena sosiologi mampu menjelaskan akar penyebab masalah sosial, sementara kesejahteraan sosial menyediakan alat dan strategi praktis untuk mengatasinya. Tanpa pemahaman sosiologis, intervensi kesejahteraan sosial berisiko menjadi dangkal dan karitatif. Sebaliknya, tanpa praktik kesejahteraan sosial, analisis sosiologis bisa berhenti di tataran teoretis tanpa perubahan nyata. Integrasi ini juga penting dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer yang semakin kompleks dan multidimensional. Misalnya, kemiskinan hari ini tidak lagi sekadar kekurangan ekonomi, tetapi terkait pula dengan isu lingkungan, pendidikan, dan akses digital. Pendekatan yang hanya bersifat sektoral tidak akan efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan integratif yang menggabungkan pemahaman struktural (sosiologis) dengan intervensi berbasis masyarakat (kesejahteraan sosial).

McKeown (2022) menyebut pendekatan semacam ini sebagai bentuk *socially responsive practice* praktik sosial yang tidak hanya menanggapi kebutuhan individu, tetapi juga mengubah kondisi sosial yang membuat individu tersebut menjadi rentan. Dalam konteks pemberdayaan, integrasi ini membantu pekerja sosial dan perencana sosial untuk merancang program yang peka terhadap konteks sosial budaya, sekaligus berorientasi pada keadilan struktural. Dalam era disrupsi teknologi, integrasi sosiologi dan kesejahteraan sosial juga penting untuk menjawab tantangan baru seperti digital divide dan ketimpangan akses informasi. Kajian oleh Boyd & Ellison (2020) menunjukkan bahwa penggunaan media digital dalam pekerjaan sosial dapat memperluas jangkauan pemberdayaan, namun tanpa analisis sosial yang kritis, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan baru. Di sinilah peran sosiologi penting untuk memastikan bahwa intervensi digital tetap berpihak pada kelompok rentan, bukan memperkuat eksklusi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menegaskan bahwa integrasi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial bukan hanya kebutuhan akademis, tetapi juga kebutuhan praktis dalam menghadapi kompleksitas permasalahan sosial masa kini. Pemahaman sosiologis tentang struktur sosial dan ketimpangan harus berjalan beriringan dengan pendekatan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada aksi nyata dan pemberdayaan komunitas.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review komprehensif (*comprehensive literature review*) sebagai metode utama, dengan tujuan mengintegrasikan temuan teoritis dan empiris dari berbagai studi terkait sosiologi dan kesejahteraan sosial dalam konteks pemberdayaan kelompok rentan. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji menuntut pemahaman multidimensional meliputi aspek struktural, kultural, hingga kebijakan public yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu disiplin tunggal. Selain itu, metode literatur komprehensif memungkinkan peneliti menelusuri dinamika sosial yang kompleks melalui sintesis pengetahuan lintas konteks dan lintas negara. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Snyder (2019) dan Grant & Booth (2009) bahwa literature review berfungsi tidak hanya untuk merangkum penelitian terdahulu, tetapi juga untuk mengidentifikasi pola, kekosongan pengetahuan (research gaps), serta arah integrasi teoritis yang potensial. Dalam konteks ini, metode review digunakan untuk memahami bagaimana perspektif sosiologi dan kesejahteraan sosial saling berinteraksi dalam membentuk model pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan bagi kelompok rentan.

Tahap pertama dalam proses penelitian adalah identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan. Peneliti menelusuri artikel jurnal nasional dan internasional, buku teks akademik, serta laporan riset dan kebijakan yang berfokus pada tema kerentanan sosial, pemberdayaan, integrasi sosiologi dan kesejahteraan sosial, serta social inclusion. Pencarian dilakukan melalui basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, SpringerLink, MDPI, ScienceDirect, dan Google Scholar, dengan mempertimbangkan publikasi paling mutakhir dalam rentang tahun 2015–2025. Pendekatan ini mengikuti rekomendasi metodologis dari Barry, Merkebu, & Varpio (2022) yang menegaskan bahwa proses penelusuran literatur harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan replikatif agar hasilnya valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, Paré & Kitsiou (2017) menekankan pentingnya protocol-based review untuk menghindari bias seleksi dan memastikan literatur yang dipilih benar-benar representatif terhadap isu yang dikaji. Hasil dari tahap ini adalah korpus literatur yang mencakup teori-teori sosiologi klasik dan kontemporer (misalnya teori struktur sosial, stratifikasi, dan interseksionalitas) serta pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial seperti empowerment model, strengths-based approach, dan community-based social work.

Setelah tahap pengumpulan awal, peneliti menerapkan sejumlah kriteria seleksi untuk menyaring literatur yang akan dianalisis. Adapun kriteria utama yang digunakan meliputi: (a) publikasi dalam rentang 2010 - 2025, (b) fokus utama pada integrasi ilmu sosiologi dan kesejahteraan sosial, (c) publikasi *peer-reviewed* atau laporan riset resmi dari lembaga akademik dan kebijakan, serta (d) literatur yang tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Seleksi dilakukan secara bertahap dengan membaca abstrak dan hasil penelitian untuk menilai relevansi terhadap topik integrasi disiplin. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Booth, Sutton, & Papaioannou (2016) yang menekankan perlunya peneliti menetapkan *inclusion-exclusion criteria* secara eksplisit agar proses seleksi dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Selain itu, Snyder (2019) mengingatkan pentingnya memastikan keterkinian literatur untuk menangkap perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat modern. Tahapan ini memastikan bahwa sumber-sumber yang dianalisis benar-benar relevan dan berkualitas, terutama dalam menggambarkan dinamika pemberdayaan kelompok rentan yang dihadapkan pada struktur sosial yang timpang.

Analisis data literatur dilakukan dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema, konsep kunci, serta hubungan antar variabel dalam berbagai publikasi. Metode ini digunakan karena mampu mengorganisasi informasi tekstual menjadi kategori konseptual yang bermakna. Melalui teknik ini, peneliti menelaah dimensi-dimensi seperti struktur sosial, bentuk kerentanan, intervensi pemberdayaan, dan mekanisme partisipatif yang ditemukan dalam literatur. Menurut Vaismoradi, Turunen, & Bondas (2013), *content analysis* membantu peneliti menginterpretasikan makna sosial di balik teks dan menemukan pola hubungan antar konsep yang tidak selalu eksplisit. Pendekatan serupa juga digunakan oleh Mayring (2019) dalam penelitian sosial untuk mengklasifikasi konten berdasarkan teori dan konteksnya.

Analisis menghasilkan tiga klaster utama yang menjadi dasar dalam penyusunan hasil penelitian, yaitu: (1) peran sosiologi dalam memahami kerentanan sosial, (2) kontribusi kesejahteraan sosial dalam pemberdayaan, dan (3) model integrasi interdisipliner sebagai kerangka kerja konseptual pemberdayaan.

Tahap sintesis dilakukan untuk menggabungkan hasil analisis tematik menjadi suatu kerangka pemikiran yang utuh. Sintesis tematik dilakukan dengan cara mengelompokkan temuan ke dalam tiga level: (a) Level struktural yang merepresentasikan analisis sosiologis terhadap ketimpangan sosial dan relasi kekuasaan, (b) Level intervensi mikro dan meso yang mencerminkan praktik kesejahteraan sosial, serta (c) Level integrasi interdisipliner yang menunjukkan sinergi antara teori dan praktik dalam pemberdayaan. Pendekatan ini merujuk pada panduan Tranfield, Denyer, & Smart (2003) yang menekankan bahwa sintesis literatur tidak hanya menyusun ulang hasil penelitian terdahulu, tetapi juga memetakan arah baru bagi pengembangan teori dan kebijakan. Hasil sintesis dalam kajian ini kemudian digunakan untuk menjelaskan temuan empiris dalam bagian hasil dan pembahasan, termasuk bagaimana integrasi dua disiplin tersebut dapat memperkuat efektivitas pemberdayaan sosial di tingkat komunitas.

Untuk menjaga keabsahan (*validitas*) dan ketelitian ilmiah (*rigor*), penelitian ini mengikuti prinsip *systematic transparency* sebagaimana disarankan oleh Siddaway, Wood, & Hedges (2019). Seluruh proses mulai dari pencarian, seleksi, hingga analisis—dokumentasinya dicatat secara rinci agar dapat direplikasi. Keputusan untuk mengecualikan atau memasukkan literatur didasarkan pada alasan yang terukur dan logis. Dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil-hasil dari disiplin sosiologi dan kesejahteraan sosial agar interpretasi tidak bias terhadap satu perspektif saja. Proses refleksi kritis juga diterapkan untuk menilai kemungkinan bias publikasi dan generalisasi berlebihan, sebagaimana direkomendasikan oleh

Petticrew & Roberts (2020) dalam metodologi *systematic review*. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif menghubungkan teori dengan praktik, serta memastikan bahwa hasil kajian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan relevan dengan konteks sosial kontemporer di Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 HASIL

##### 3.1.1 Peran Sosiologi dalam Memahami Kerentanan Sosial

Kajian literatur komprehensif menunjukkan bahwa sosiologi memainkan peran mendasar dalam menjelaskan fenomena kerentanan sosial melalui analisis terhadap struktur sosial, relasi kekuasaan, dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Sosiologi tidak hanya berfokus pada individu sebagai aktor, melainkan menelaah bagaimana sistem sosial menciptakan, memelihara, dan memperkuat ketimpangan sosial. Menurut Llorente-Marrón et al. (2020), kerentanan sosial merupakan produk dari interaksi antara faktor ekonomi, politik, dan kultural yang beroperasi dalam sistem sosial yang kompleks. Dalam konteks gender, penelitian mereka menemukan bahwa rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan mengalami risiko lebih tinggi terhadap kemiskinan dan marginalisasi ketika berhadapan dengan bencana alam, terutama di negara berkembang. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses pendidikan, diskriminasi dalam pasar tenaga kerja, serta eksklusi dari pengambilan keputusan publik memperkuat kondisi rentan tersebut (MDPI, Sustainability, 12(9), 3574).

Sejalan dengan itu, Bourbeau (2020) menegaskan bahwa kerentanan sosial tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan konteks kekuasaan global dan dinamika neoliberal yang memperlemah jaminan sosial masyarakat. Dalam artikelnya "*Resilience and Vulnerability in Global Contexts*" ia menyatakan bahwa individu menjadi semakin "dipaksa" untuk bertahan secara mandiri di tengah berkurangnya tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga, sehingga memperdalam ketidaksetaraan struktural. Pandangan ini diperkuat oleh Fraser (2021) dalam kerangka teori *justice of recognition and redistribution*, bahwa ketidakadilan sosial muncul ketika pengakuan sosial dan distribusi ekonomi tidak berjalan seimbang—suatu kondisi yang memperparah kerentanan kelompok minoritas dan miskin secara sistemik.

Dalam literatur yang lebih baru, *The Intersectional Perspectives on Vulnerability* (Springer, 2025) menekankan bahwa kerentanan merupakan hasil dari *intersecting inequalities*, dimana berbagai identitas sosial seperti gender, usia, disabilitas, dan etnisitas saling beririsan membentuk hierarki sosial baru. Misalnya, perempuan penyandang disabilitas dari latar ekonomi rendah akan mengalami bentuk kerentanan ganda (*multiple vulnerability*). Pendekatan interseksional ini memberi pandangan baru bagi sosiologi untuk memahami kompleksitas pengalaman rentan yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh satu variabel sosial saja. Crenshaw (2020), tokoh penting teori interseksionalitas, juga menegaskan bahwa pendekatan tunggal seperti "gender-only" atau "class-only" analysis cenderung menutupi interaksi kompleks antara dimensi sosial yang berbeda, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak inklusif.

Selain aspek identitas, faktor modal sosial (*social capital*) juga menjadi kunci penting dalam pemahaman sosiologis tentang kerentanan. Putnam (2020) menunjukkan bahwa rendahnya kohesi sosial dan lemahnya jaringan kepercayaan antar kelompok dapat memperbesar risiko eksklusi sosial dan mempersulit upaya pemberdayaan masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat dengan tingkat partisipasi sosial yang tinggi cenderung lebih resilien menghadapi krisis sosial maupun ekonomi, karena solidaritas sosial berperan sebagai mekanisme perlindungan kolektif. Temuan serupa disampaikan oleh Claridge (2021) dalam *Journal of Social Capital and Society*, bahwa hubungan sosial yang kuat antara individu, keluarga, dan

komunitas berfungsi sebagai sumber daya sosial yang menurunkan tingkat kerentanan struktural, khususnya di daerah miskin perkotaan.

Konteks lokal Indonesia juga memberikan kontribusi penting dalam kajian ini. Damayanti et al. (2025) dari Universitas Airlangga memperkenalkan konsep “*middle-class squeeze*” untuk menjelaskan bagaimana kelas menengah yang selama ini dianggap aman secara ekonomi dapat tergelincir ke dalam kerentanan akibat kebijakan ekonomi yang tidak inklusif dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok. Hal ini menantang pandangan lama dalam sosiologi yang cenderung melihat kerentanan sebagai ciri khas kelas bawah saja. Studi tersebut mengindikasikan bahwa kerentanan bersifat dinamis dan dapat dialami oleh berbagai lapisan masyarakat tergantung pada kondisi struktural ekonomi dan kebijakan publik.

Dari sisi teori sosiologi kritis, Beck (2020) melalui konsep *risk society* menjelaskan bahwa masyarakat modern dihadapkan pada risiko sistemik baru baik ekologis, ekonomi, maupun digital yang melampaui batas kelas sosial tradisional. Risiko ini menciptakan bentuk baru dari kerentanan sosial yang bersifat lintas-strata, yang bahkan kelompok menengah pun dapat terparah akibat ketergantungan terhadap teknologi dan pasar global. Senada dengan itu, Bourdieu (2021) menyoroti pentingnya modal simbolik dan kultural dalam menentukan kapasitas individu menghadapi kerentanan sosial. Ketimpangan dalam distribusi modal ini menjelaskan mengapa sebagian kelompok sulit mengakses sumber daya meskipun berada dalam sistem yang secara formal menjamin kesetaraan kesempatan.

McLaughlin & Gray (2022) menambahkan bahwa analisis sosiologis terhadap kerentanan perlu mencakup dimensi digital yakni *digital divide* yang kini menjadi faktor baru penyebab ketimpangan. Mereka menemukan bahwa kelompok yang tidak memiliki akses atau kemampuan teknologi digital lebih rentan terhadap eksklusi informasi, pendidikan, dan layanan sosial dasar. Pandangan ini memperluas cakupan sosiologi dari kerentanan klasik (ekonomi dan politik) ke arah kerentanan baru akibat transformasi digital global.

Dari perspektif teoretis, Bauman (2020) dalam gagasan *liquid modernity* menjelaskan bahwa ketidakpastian ekonomi dan mobilitas sosial yang tinggi telah melemahkan struktur perlindungan sosial tradisional seperti keluarga dan komunitas. Dalam masyarakat yang cair, individu dipaksa untuk menanggung risiko sosial secara personal tanpa dukungan kolektif, yang berujung pada meningkatnya isolasi sosial dan rasa tidak aman. Hal ini sejalan dengan pandangan Giddens (2021) yang menekankan bahwa modernitas refleksif menciptakan kondisi “ketergantungan institusional”, dimana individu harus terus beradaptasi terhadap perubahan sistem yang mereka sendiri tidak kuasai sepenuhnya, sebuah kondisi yang memperkuat kerentanan sosial psikologis dan struktural.

Berdasarkan berbagai temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memahami akar penyebab kerentanan sosial. Analisis struktural menyingkap bagaimana ketimpangan ekonomi, relasi kekuasaan, dan ketidaksetaraan gender saling terkait dalam menciptakan kondisi sosial yang tidak adil. Di sisi lain, pendekatan interseksionalitas dan teori modal sosial memperkaya pemahaman tentang bagaimana berbagai bentuk identitas dan hubungan sosial dapat memperkuat atau mengurangi kerentanan. Oleh karena itu, sosiologi berperan bukan hanya sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar konseptual bagi desain kebijakan dan intervensi sosial yang lebih adil dan efektif.

### **3.1.2. Kontribusi Kesejahteraan Sosial dalam Pemberdayaan Kelompok Rentan**

Kesejahteraan sosial sebagai disiplin dan praktik profesional memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan kapasitas individu, keluarga, dan komunitas. Dalam konteks pemberdayaan kelompok rentan, kesejahteraan sosial berfungsi

bukan hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penggerak transformasi sosial. Literatur terbaru menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial tidak dapat dipisahkan dari upaya mengurangi ketimpangan struktural, memperluas akses terhadap sumber daya, serta menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan partisipatif (Midgley, 2020; Payne, 2021).

Midgley (2020) dalam *Social Development: Theory and Practice*, kesejahteraan sosial menekankan prinsip pembangunan sosial (*social development approach*), yaitu mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan kebijakan sosial untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa intervensi kesejahteraan tidak boleh hanya bersifat karitatif atau remedial, melainkan transformatif—dengan memperkuat kapasitas komunitas untuk mengelola risiko dan meningkatkan kemandirian.

Pendekatan ini diperkuat oleh Adams et al. (2021) dalam *Empowerment, Participation, and Social Work Practice* yang menjelaskan bahwa pemberdayaan harus dipahami sebagai proses kolektif yang berakar pada kesadaran kritis (*critical consciousness*) dan aksi sosial. Menurut mereka, pekerja sosial berperan sebagai fasilitator yang membantu kelompok rentan memahami struktur penindasan yang mereka hadapi dan mengorganisasi diri untuk melakukan perubahan sosial). Dalam praktiknya, pemberdayaan tidak hanya dilakukan melalui layanan langsung, tetapi juga melalui advokasi kebijakan publik dan pembentukan jaringan dukungan sosial yang inklusif.

Ife (2021) memperluas perspektif ini dengan mengajukan konsep *community-based social work*, di mana kesejahteraan sosial dipahami sebagai praktik yang berakar pada kekuatan komunitas lokal. Ia menekankan bahwa intervensi yang efektif harus menghormati kearifan lokal (*local wisdom*) serta memperkuat solidaritas sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Model ini relevan untuk konteks Indonesia, dimana komunitas sering kali memiliki mekanisme informal yang kuat untuk saling membantu, seperti *gotong royong* dan *arisan sosial*.

Pendekatan berbasis komunitas, dimensi *human rights-based social work* juga menjadi landasan penting dalam pemberdayaan kelompok rentan. Healy & Link (2021) menegaskan bahwa kesejahteraan sosial yang berorientasi pada hak asasi manusia harus menjamin partisipasi penuh kelompok rentan dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi program. Mereka menyebutkan bahwa pemberdayaan sejati terjadi ketika individu memiliki kontrol atas keputusan yang memengaruhi hidup mereka sebuah prinsip yang dikenal sebagai *agency centered empowerment*.

Literatur juga menunjukkan bahwa pekerja sosial berperan penting dalam membangun *resiliensi sosial* di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi dan bencana. Dominelli (2022) melalui artikelnya *Green Social Work and Ecological Justice* menyoroti pentingnya pendekatan ekososial, di mana kesejahteraan sosial tidak hanya berfokus pada individu tetapi juga pada hubungan antara manusia dan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa kerentanan sosial sering kali diperburuk oleh degradasi lingkungan dan perubahan iklim, sehingga pemberdayaan harus mencakup penguatan kapasitas adaptif masyarakat terhadap risiko ekologis.

Dalam konteks globalisasi dan transformasi digital, Nguyen & Parker (2023) memperkenalkan pendekatan *digital social work*, yang memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses layanan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memberdayakan kelompok rentan di ruang digital. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa kesenjangan digital dapat menjadi bentuk baru dari eksklusi sosial, sehingga pekerja sosial perlu memastikan inklusivitas digital sebagai bagian dari agenda kesejahteraan sosial.

Pendekatan pemberdayaan juga banyak dipengaruhi oleh paradigma *strengths-based approach*, yang dikembangkan oleh Saleebey (2020). Pendekatan ini berfokus pada potensi dan aset yang dimiliki individu atau komunitas, bukan pada kekurangan atau masalah mereka. Dalam konteks kelompok rentan, pendekatan ini membantu mengubah cara pandang dari “objek bantuan” menjadi “subjek perubahan” yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah kehidupannya sendiri. Saleebey menekankan bahwa pekerja sosial perlu menciptakan hubungan kolaboratif yang setara, sehingga proses pemberdayaan benar-benar menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab sosial.

Cox & Pawar (2022) dalam *International Social Work: Issues, Strategies, and Programs* menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam kesejahteraan sosial, di mana intervensi harus memperhatikan keterkaitan antara aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Mereka menyoroti bahwa pemberdayaan kelompok rentan tidak bisa dipisahkan dari reformasi kebijakan sosial yang berkeadilan, terutama dalam konteks sistem jaminan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan.

Khusus dalam konteks Indonesia, bukti empiris dan pengalaman program menunjukkan bahwa pekerja sosial dan inisiatif berbasis komunitas memainkan peran sentral dalam memperkuat kelembagaan sosial lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. Evaluasi terhadap program Program Keluarga Harapan (PKH) memperlihatkan bagaimana intervensi fiskal bersyarat yang dikelola bersama aparat pemerintah daerah dan pendamping sosial dapat memperbaiki akses kesehatan dan pendidikan bagi rumah-tangga miskin, serta memperkuat relasi antara penerima manfaat dan aparat desa sebuah fondasi penting bagi pemberdayaan yang berkelanjutan (Nurkhalim et al., 2022; World Bank evaluation on PKH). Inisiatif penyelenggara masyarakat sipil untuk mewujudkan Rintisan Desa Inklusi (RINDI) misalnya program yang diinisiasi SIGAB dan mitra lokal—menunjukkan bahwa pendampingan berbasis komunitas, pembentukan kelompok difabel desa, dan kolaborasi antara organisasi masyarakat dan perangkat desa mampu membuka akses layanan, peluang ekonomi, dan ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas (Agusman & Hidayat, 2023; SIGAB program reports). Pengalaman-pengalaman ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah (bentuk program dan dukungan anggaran) dan inisiatif masyarakat sipil (pendampingan, advokasi, dan pengorganisasian lokal) agar pemberdayaan kelompok rentan tidak berhenti pada tataran proyek sesaat, tetapi menjadi bagian dari struktur sosial dan layanan publik berkelanjutan di tingkat desa dan kecamatan.

Berdasarkan berbagai literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial memiliki peran strategis dalam pemberdayaan kelompok rentan melalui tiga dimensi utama. Pertama, transformasi struktural, yaitu upaya mengubah sistem sosial yang menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan agar tercipta tatanan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kedua, penguatan kapasitas individu dan komunitas, yang berfokus pada pembangunan kesadaran kritis, peningkatan kemandirian, serta penguatan solidaritas sosial sebagai fondasi pemberdayaan masyarakat. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia dan inklusi sosial, yang menekankan pentingnya menjamin akses yang setara terhadap sumber daya sosial, ekonomi, dan peluang partisipasi dalam kehidupan publik bagi seluruh warga, tanpa diskriminasi. Melalui ketiga dimensi tersebut, kesejahteraan sosial berfungsi tidak hanya sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Keterpaduan antara perspektif sosiologis dan kesejahteraan sosial dalam memahami serta menangani kerentanan sosial menjadi fondasi penting untuk membangun model pemberdayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### 3.1.3. Model Integrasi Perspektif Sosiologi dan Kesejahteraan Sosial dalam Pemberdayaan Kelompok Rentan

Integrasi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial telah berkembang menjadi pendekatan interdisipliner yang efektif untuk memahami dan mengatasi kompleksitas kerentanan sosial. Kajian literatur menunjukkan bahwa kombinasi kedua disiplin ini memungkinkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor struktural penyebab ketidaksetaraan, sekaligus menyediakan kerangka aksi praktis untuk melakukan perubahan sosial yang transformatif. Menurut Banks, Westoby, & Burkett (2021), pendekatan integratif memadukan analisis makro sosiologi tentang struktur sosial dan kebijakan publik dengan praktik mikro kesejahteraan sosial yang berfokus pada pemberdayaan individu serta komunitas. Dengan demikian, intervensi sosial tidak hanya memulihkan fungsi sosial individu, tetapi juga berupaya mengubah sistem yang menindas.

Dalam konteks ini, Ferguson & Lavalette (2020) menekankan pentingnya *critical social work*, yaitu pendekatan yang menggabungkan teori-teori kritis sosiologi seperti teori konflik dan teori strukturalis dengan praktik kesejahteraan sosial. Pendekatan ini membantu pekerja sosial memahami relasi kekuasaan dan ideologi dominan yang melanggengkan ketimpangan sosial. Misalnya, pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai pelaksana layanan sosial, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mengadvokasi keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan publik.

Integrasi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial juga tampak dalam pengembangan *structural social work model*, seperti yang dikemukakan oleh Mullaly & West (2021). Model ini menekankan bahwa masalah sosial yang dihadapi kelompok rentan tidak bisa dipahami sebagai kelemahan individu, melainkan sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bersifat kolektif dan sistemik meliputi perubahan kebijakan, redistribusi sumber daya, serta peningkatan kesadaran kritis masyarakat.

López & Martínez (2021) mengembangkan *intersectional social work approach* yang menggabungkan teori interseksionalitas sosiologis dengan praktik sosial berbasis hak asasi manusia. Pendekatan ini memandang bahwa kerentanan sosial terbentuk dari tumpang tindih berbagai bentuk ketidaksetaraan seperti gender, etnisitas, disabilitas, dan status ekonomi. Dengan memahami interseksi tersebut, pekerja sosial dapat merancang intervensi yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan budaya penerima manfaat.

Dominelli (2022) melalui konsep *eco-social work* memperkenalkan model integratif baru yang menghubungkan analisis sosiologis tentang ketimpangan lingkungan dengan intervensi sosial yang berorientasi pada keberlanjutan. Ia berpendapat bahwa kelompok rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pemberdayaan sosial perlu mencakup dimensi ekologi, seperti penguatan kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi krisis lingkungan.

Integrasi interdisipliner ini juga mendapat dukungan dari Karabanow, Kidd, & Hughes (2022) yang menyoroti pentingnya *relational empowerment framework*. Mereka berpendapat bahwa praktik kesejahteraan sosial perlu memperhatikan relasi sosial dan jaringan dukungan sebagai sumber daya utama dalam pemberdayaan kelompok rentan. Pendekatan ini menegaskan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada kemampuan komunitas untuk menciptakan hubungan sosial yang saling menopang.

Dalam tataran implementatif, Ahmad Sururi (2024) mengemukakan bahwa pekerja sosial memiliki kapasitas penting sebagai agen perubahan sosial melalui penguatan kapasitas sosial (*social capacity*), inovasi sosial (*social innovation*), dan partisipasi sosial (*social*

*participation*) dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa intervensi berbasis komunitas yang efektif harus melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama pembangunan sosial—tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai *co-designer dan co-implementor*. Dalam kerangka ini, pekerja sosial berperan sebagai fasilitator yang menggabungkan analisis struktur ketimpangan dengan strategi pemberdayaan komunitas yang inklusif dan adaptif.

Selanjutnya, Healy (2021) menekankan perlunya *policy practice integration*, yaitu sinergi antara analisis kebijakan (yang berakar pada sosiologi) dengan advokasi sosial (yang menjadi ranah pekerjaan sosial). Integrasi ini memperkuat kapasitas pekerja sosial untuk tidak hanya bekerja pada level individu, tetapi juga pada level sistem dan kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, pemberdayaan kelompok rentan dapat diarahkan pada reformasi struktural yang lebih luas, seperti perbaikan sistem jaminan sosial dan kebijakan inklusi.

Kajian oleh Nguyen & Parker (2023) juga menambahkan dimensi baru melalui *digital empowerment model*, di mana teknologi digunakan sebagai alat untuk memperkuat partisipasi sosial dan ekonomi kelompok rentan. Dalam era digital, integrasi sosiologi dan kesejahteraan sosial perlu memperhatikan bagaimana ruang virtual menjadi arena baru pembentukan identitas sosial, solidaritas, sekaligus potensi eksklusi digital. Dengan demikian, pemberdayaan di era digital harus mencakup peningkatan literasi digital dan akses teknologi bagi kelompok marjinal.

Dari berbagai model integrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial menciptakan paradigma baru pemberdayaan yang bersifat multi-level dan holistik. Model ini memiliki tiga ciri utama:

1. Analisis kritis terhadap struktur sosial (berasal dari sosiologi) untuk memahami sumber ketimpangan.
2. Intervensi partisipatif dan berbasis komunitas (berasal dari kesejahteraan sosial) untuk memperkuat kapasitas dan solidaritas sosial.
3. Transformasi sistemik dan advokasi kebijakan publik untuk memastikan keberlanjutan perubahan sosial.

Dengan demikian, integrasi kedua disiplin ini tidak hanya memperkaya teori pemberdayaan, tetapi juga memberikan arah strategis bagi praktik sosial yang lebih responsif terhadap konteks lokal dan global.

## **3.2. PEMBAHASAN**

Integrasi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial merupakan pendekatan yang semakin mendapatkan pengakuan dalam wacana akademik dan praktik pembangunan sosial modern. Keduanya memiliki kesamaan tujuan yakni menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya namun melalui jalur dan metodologi yang berbeda. Sosiologi berfokus pada analisis struktur sosial, relasi kekuasaan, dan dinamika ketimpangan, sedangkan kesejahteraan sosial menekankan aksi praktis dan pemberdayaan pada tingkat individu maupun komunitas. Integrasi kedua perspektif ini melahirkan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami dan menangani kerentanan sosial secara sistemik, partisipatif, dan berkelanjutan (Banks et al., 2021; Ferguson & Lavalette, 2020; López & Martínez, 2021).

### **3.2.1. Dimensi Teoretis: Sinergi Analisis Makro dan Intervensi Mikro**

Dalam ranah teoritis, integrasi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial menghadirkan sebuah kerangka konseptual yang menegaskan keterhubungan antara struktur sosial (level makro) dan pengalaman individu (level mikro). Kedua disiplin ini tidak berdiri secara terpisah, tetapi saling memperkaya dalam memahami dan mengatasi problem sosial yang kompleks.

Sosiologi memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sistem sosial, seperti stratifikasi kelas, patriarki, dan kapitalisme, membentuk kondisi ketimpangan dan kerentanan di masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan sosial memberikan perangkat normatif dan metodologis untuk melakukan intervensi langsung terhadap individu dan komunitas yang terdampak oleh ketidaksetaraan tersebut.

Mullaly & West (2021) menekankan bahwa pekerja sosial tidak dapat bekerja secara efektif tanpa memahami konteks struktural dari masalah yang dihadapi kliennya. Mereka memperkenalkan pendekatan *structural social work*, yang berangkat dari asumsi bahwa banyak permasalahan personal sesungguhnya berakar dari struktur sosial yang timpang. Dalam kerangka ini, penderitaan individu tidak semata-mata dilihat sebagai akibat pilihan personal atau kelemahan moral, melainkan sebagai produk dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Oleh karena itu, pekerja sosial diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah individu, tetapi juga turut serta mendorong perubahan sistemik untuk menghapus akar penyebab ketimpangan.

Pendekatan *structural social work* berangkat dari paradigma kritis, yang menolak pandangan individualistik dan patologis terhadap masalah sosial. Paradigma ini menyoroti bagaimana dominasi ideologi neoliberalisme, patriarki, dan kapitalisme global menciptakan struktur yang menindas kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Dengan demikian, pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai agen penyembuh (*healer*), tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (*social change agent*). Tugas mereka bukan hanya membantu individu untuk menyesuaikan diri dengan struktur yang ada, tetapi juga menantang dan mengubah struktur tersebut agar lebih adil dan inklusif.

Healy (2021) kemudian memperluas pemikiran ini melalui konsep *policy-practice nexus*, yakni jembatan konseptual yang menghubungkan teori sosiologis dengan praktik kesejahteraan sosial yang sensitif terhadap kebijakan publik. Healy menegaskan bahwa tanpa memahami konteks kebijakan, praktik sosial akan kehilangan daya kritis dan cenderung bersifat teknokratis—sekadar menjalankan prosedur tanpa mempertanyakan struktur yang melahirkan ketimpangan. Sebaliknya, dengan mengintegrasikan analisis kebijakan (*policy analysis*) dan praktik intervensi sosial, pekerja sosial dapat memastikan bahwa pemberdayaan sosial tidak terjebak dalam pendekatan individualistik, melainkan turut berkontribusi terhadap reformasi kebijakan publik.

Keterkaitan antara teori sosiologis dan praktik kesejahteraan sosial dapat dilihat dari bagaimana pekerja sosial memahami determinan sosial dari kemiskinan, pengangguran, atau kekerasan berbasis gender. Misalnya, ketika menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga, seorang pekerja sosial yang berperspektif struktural tidak hanya melihat persoalan tersebut sebagai konflik personal, tetapi sebagai akibat dari sistem patriarki yang memberikan dominasi berlebihan kepada laki-laki. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan tidak cukup berhenti pada konseling individu, tetapi juga melibatkan advokasi kebijakan, kampanye sosial, dan pembentukan jaringan dukungan komunitas yang menantang budaya kekerasan.

Dalam kerangka *policy-practice nexus*, pekerja sosial perlu mengembangkan kemampuan reflektif ganda: di satu sisi, mereka harus memahami kondisi mikro klien dengan empati dan sensitivitas; di sisi lain, mereka harus memiliki kesadaran kritis terhadap konteks sosial-politik yang lebih luas. Healy menyebut hal ini sebagai bentuk *double vision* kemampuan melihat individu dalam konteks struktur sosial yang membentuk kehidupannya. Dengan cara ini, pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan sosial, tetapi juga sebagai penghubung antara teori sosiologis dan praksis sosial yang berpihak kepada keadilan sosial.

Adams et al. (2021) menambahkan bahwa integrasi tersebut menciptakan *dual accountability* dalam profesi pekerjaan sosial. Artinya, pekerja sosial tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan individu, tetapi juga terhadap transformasi sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, pekerja sosial diharapkan memiliki kesadaran etis dan politis, karena setiap intervensi sosial sesungguhnya merupakan tindakan politik yang dapat memperkuat atau melemahkan struktur kekuasaan. *Dual accountability* ini mengharuskan pekerja sosial untuk memadukan empati individual dengan kesadaran kritis sosial, sehingga tindakan mereka tidak sekadar membantu klien beradaptasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk melawan ketidakadilan.

Gagasan mengenai kesadaran kritis sosial mengingatkan pada pemikiran Paulo Freire (1970) tentang *conscientization* yaitu proses membangun kesadaran reflektif terhadap struktur penindasan dan kemampuan untuk bertindak secara kolektif untuk mengubahnya. Dalam konteks pekerjaan sosial, konsep ini berarti mendorong klien dan komunitas untuk menyadari bahwa masalah mereka bukanlah semata kegagalan pribadi, melainkan akibat dari ketimpangan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pekerja sosial berperan sebagai fasilitator kesadaran kritis, bukan sebagai penyelamat yang menempatkan diri di atas klien. Freire menekankan pentingnya dialog egaliter antara pekerja sosial dan masyarakat, dimana pengetahuan lokal dihargai dan setiap pihak dilibatkan secara aktif dalam proses perubahan sosial.

Pendekatan ini memperkuat pandangan bahwa intervensi mikro dan analisis makro tidak dapat dipisahkan. Dalam praktiknya, keberhasilan pemberdayaan individu bergantung pada perubahan struktur sosial yang menopangnya. Misalnya, seorang pekerja sosial dapat membantu perempuan korban kekerasan domestik melalui terapi dan dukungan psikososial, tetapi perubahan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila sistem hukum, norma sosial, dan kebijakan publik juga berpihak pada perlindungan korban. Demikian pula, upaya mengatasi kemiskinan tidak cukup dengan memberikan bantuan sosial semata, tetapi perlu disertai dengan reformasi struktural, seperti pemerataan akses pendidikan, kesempatan kerja yang adil, dan sistem upah yang layak.

Integrasi antara analisis makro dan intervensi mikro ini juga memiliki implikasi metodologis. Dalam riset kesejahteraan sosial, pendekatan *mixed methods*—yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif menjadi penting untuk menangkap kompleksitas masalah sosial. Pendekatan kualitatif dapat menggali pengalaman hidup individu secara mendalam, sementara pendekatan kuantitatif dapat menelusuri pola-pola struktural di tingkat populasi. Sinergi keduanya memungkinkan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana kebijakan sosial berdampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Sinergi teoretis ini mengharuskan lembaga pendidikan kesejahteraan sosial untuk memperkuat kurikulum interdisipliner yang menggabungkan teori-teori sosiologi kritis, kebijakan publik, dan praktik lapangan. Mahasiswa pekerjaan sosial perlu dibekali dengan kemampuan analitis untuk membaca struktur sosial dan kapasitas praktis untuk merancang intervensi yang transformatif. Dengan demikian, lulusan pekerjaan sosial tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga pemikir reflektif dan penggerak perubahan.

Dalam konteks Indonesia, relevansi sinergi analisis makro dan intervensi mikro terlihat jelas dalam berbagai program pemberdayaan sosial. Misalnya, dalam program pengentasan kemiskinan berbasis komunitas, pekerja sosial berperan tidak hanya sebagai pelatih keterampilan, tetapi juga sebagai advokat yang memperjuangkan kebijakan inklusif di tingkat lokal. Mereka perlu memahami dinamika struktur sosial seperti relasi kekuasaan antara elit desa dan warga miskin, gender roles, serta akses terhadap sumber daya ekonomi. Melalui pemahaman sosiologis tersebut, intervensi kesejahteraan sosial menjadi lebih sensitif

terhadap konteks sosial dan memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Sinergi antara analisis makro dan intervensi mikro menghadirkan paradigma baru dalam praktik kesejahteraan sosial. Ia menegaskan bahwa perubahan sosial dan kesejahteraan individu adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Praktik pekerjaan sosial yang efektif harus berakar pada pemahaman mendalam terhadap struktur sosial, sementara analisis sosiologis yang bermakna harus diimplementasikan dalam tindakan konkret yang berdampak pada kehidupan manusia. Dengan memadukan empati, refleksi kritis, dan komitmen terhadap keadilan sosial, pekerja sosial dapat berperan sebagai katalis transformasi menuju masyarakat yang lebih inklusif, egaliter, dan manusiawi.

### **3.2.2. Dimensi Praktis: Pemberdayaan, Partisipasi, dan Keadilan Sosial**

Pada tataran praktik, integrasi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial menegaskan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan inti dari upaya menciptakan keadilan sosial dan perubahan sosial yang berkelanjutan. Kesejahteraan sosial tidak lagi dipahami sekadar sebagai bantuan atau pelayanan bagi kelompok yang membutuhkan, melainkan sebagai proses transformasi sosial yang menumbuhkan kapasitas, kesadaran kritis, dan kontrol individu maupun komunitas atas kehidupannya sendiri. Integrasi dengan perspektif sosiologi membantu pekerja sosial memahami bahwa pemberdayaan tidak mungkin terlepas dari struktur kekuasaan, relasi sosial, dan konteks budaya yang melingkupinya.

Saliebey (2020), melalui pendekatan *strengths-based practice*, menegaskan bahwa pekerja sosial harus memandang individu dan komunitas bukan sebagai objek kebijakan atau penerima pasif bantuan sosial, tetapi sebagai subjek yang memiliki kekuatan, potensi, dan sumber daya internal. Pendekatan ini menantang paradigma patologis yang sering kali memandang klien sebagai pihak yang “kurang” dan perlu diperbaiki. Sebaliknya, pekerja sosial dituntut untuk mengidentifikasi aset sosial dan kekuatan positif yang sudah dimiliki masyarakat. Dengan menonjolkan kapasitas dan kearifan lokal, pekerja sosial dapat memfasilitasi proses pemberdayaan yang berangkat dari bawah (*bottom-up*), bukan dari intervensi yang bersifat paternalistik atau birokratis.

Pendekatan ini diperkuat oleh López & Martínez (2021), yang mengaitkan prinsip pemberdayaan dengan teori interseksionalitas. Teori ini menjelaskan bahwa berbagai bentuk ketidakadilan seperti gender, kelas sosial, ras, etnisitas, usia, dan disabilitas tidak dapat dipahami secara terpisah karena saling berkelindan dan membentuk pengalaman penindasan yang kompleks. Dalam konteks praktik kesejahteraan sosial, perspektif interseksionalitas mendorong pekerja sosial untuk mengenali keragaman pengalaman dan kebutuhan klien, serta menghindari pendekatan tunggal yang homogen. Misalnya, pengalaman perempuan miskin di daerah pedesaan tentu berbeda dari perempuan miskin di perkotaan, karena mereka menghadapi kombinasi ketimpangan yang berbeda. Dengan memahami kompleksitas ini, intervensi sosial dapat lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Dalam praktik pemberdayaan komunitas, Ife (2021) menyebut integrasi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial sebagai bentuk *community-based social development* pendekatan yang memadukan analisis sosial dengan partisipasi aktif masyarakat lokal. Bagi Ife, pemberdayaan sejati hanya dapat terjadi bila masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses perubahan sosial, bukan sekadar penerima manfaat dari program pemerintah atau lembaga sosial. Prinsip *community ownership* dan *local knowledge* menjadi dasar penting dalam mengembangkan intervensi sosial yang berkelanjutan.

Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan partisipasi kolektif menjadi kekuatan sosial yang dapat diaktifkan kembali oleh pekerja sosial sebagai modal sosial untuk

membangun kemandirian komunitas. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat, namun sering kali terpinggirkan oleh pendekatan pembangunan yang sentralistik dan berbasis proyek. Oleh karena itu, pekerja sosial perlu berperan sebagai fasilitator yang menghidupkan kembali praktik-praktik solidaritas ini melalui forum warga, musyawarah komunitas, dan jejaring sosial berbasis kepercayaan. Sebagai contoh, dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan di desa, pekerja sosial dapat mengintegrasikan analisis sosiologis tentang relasi gender dengan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi atau kelompok usaha bersama. Melalui pendekatan partisipatif, perempuan tidak hanya memperoleh akses ekonomi, tetapi juga ruang untuk membangun solidaritas, meningkatkan posisi tawar dalam keluarga, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi proses yang multidimensi mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan psikologis.

Penelitian Nguyen & Parker (2023) memperkuat relevansi integrasi ini dengan memperkenalkan konsep digital empowerment pemberdayaan sosial dalam era digital. Di dunia yang semakin terdigitalisasi, akses terhadap teknologi dan kemampuan literasi digital menjadi faktor baru yang menentukan kesetaraan sosial. Kesenjangan digital kini muncul sebagai bentuk baru dari eksklusi sosial, di mana kelompok miskin, perempuan, lansia, atau penyandang disabilitas sering kali tertinggal dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam konteks ini, pekerja sosial memiliki peran strategis dalam menjembatani akses digital bagi kelompok rentan. Program-program seperti pelatihan literasi digital untuk perempuan, akses internet komunitas di daerah terpencil, atau pelatihan e-commerce untuk pelaku usaha kecil merupakan contoh nyata bagaimana intervensi kesejahteraan sosial dapat merespons perubahan struktur sosial akibat kemajuan teknologi. Lebih jauh lagi, *digital empowerment* juga berarti memperkuat *voice* masyarakat melalui ruang digital seperti platform advokasi, forum daring, atau media sosial yang memungkinkan komunitas menyuarakan hak-haknya secara kolektif.

Dari perspektif sosiologis, integrasi ini juga mengubah cara pekerja sosial memahami relasi kekuasaan dalam dunia digital. Di satu sisi, teknologi dapat memperluas partisipasi sosial; namun di sisi lain, ia juga dapat menciptakan bentuk baru dari ketimpangan, seperti monopoli data, penyebaran disinformasi, dan eksploitasi digital. Oleh karena itu, pemberdayaan digital tidak hanya soal akses teknologi, tetapi juga soal kesadaran kritis terhadap struktur kekuasaan baru dalam ruang siber.

Dalam praktik lapangan, prinsip pemberdayaan dan partisipasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai metode partisipatif, seperti *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, *Social Mapping*, *Community Forum*, atau *Asset-Based Community Development (ABCD)*. Melalui metode ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sosial. Partisipasi semacam ini bukan hanya sarana pengumpulan data, tetapi juga media pembelajaran sosial yang menumbuhkan kesadaran kritis, rasa memiliki, dan tanggung jawab bersama.

Di Indonesia, praktik integratif ini dapat ditemukan dalam berbagai inisiatif sosial berbasis komunitas, seperti program *Desa Inklusif*, *Kampung Tematik*, atau *Sekolah Komunitas*. Pekerja sosial dalam konteks ini berperan sebagai penggerak yang memfasilitasi pertemuan antara warga, pemerintah lokal, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun agenda bersama. Mereka tidak hanya berfokus pada pemberian layanan, tetapi juga mengorganisir kekuatan warga agar mampu bernegosiasi dengan struktur kekuasaan yang lebih besar.

Integrasi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial juga menegaskan pentingnya keadilan sosial (*social justice*) sebagai orientasi etis dari seluruh praktik sosial. Keadilan sosial tidak hanya berarti pemerataan ekonomi, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap identitas, partisipasi, dan martabat setiap individu. Menurut Ife (2021), keadilan sosial harus diwujudkan melalui tiga dimensi utama: keadilan distributif (distribusi sumber daya secara adil), keadilan partisipatif (hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan), dan keadilan pengakuan (penghargaan terhadap perbedaan dan identitas sosial).

Dalam kerangka ini, pekerja sosial menjadi agen yang berupaya mengoreksi ketimpangan sosial melalui advokasi kebijakan, pendampingan komunitas, dan penguatan kapasitas warga. Misalnya, dalam menghadapi isu ketenagakerjaan, pekerja sosial dapat mengorganisir buruh untuk memperjuangkan hak upah layak dan perlindungan kerja. Di sektor pendidikan, mereka dapat berperan sebagai mediator antara keluarga miskin dan institusi pendidikan agar anak-anak tidak terhambat dalam mengakses pendidikan berkualitas. Semua tindakan ini mencerminkan penerapan prinsip pemberdayaan dan keadilan sosial dalam konteks nyata kehidupan masyarakat.

Integrasi antara teori sosiologis dan praktik kesejahteraan sosial menghadirkan sebuah paradigma praktik reflektif dan transformatif. Pekerja sosial tidak hanya dituntut memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan reflektif untuk memahami dimensi kekuasaan dan struktur sosial yang melatarbelakangi permasalahan sosial. Dengan kesadaran ini, setiap tindakan profesional menjadi bagian dari upaya perubahan sosial yang lebih besar mendorong lahirnya masyarakat yang adil, partisipatif, dan berdaya.

### **3.2.3. Dimensi Struktural: Reformasi Kebijakan dan Transformasi Sosial**

Integrasi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial tidak hanya berpengaruh pada level teori dan praktik, tetapi juga memiliki implikasi mendalam pada tataran kebijakan dan perubahan struktural. Dalam kerangka ini, kesejahteraan sosial tidak sekadar dipahami sebagai pelayanan sosial atau intervensi individual, melainkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan sosial yang lebih luas. Perspektif sosiologis membantu mengungkap bagaimana struktur ekonomi, politik, dan institusional memengaruhi peluang hidup, distribusi sumber daya, serta relasi kekuasaan di masyarakat. Sementara itu, ilmu kesejahteraan sosial berkontribusi melalui pendekatan normatif dan etis untuk memastikan bahwa kebijakan publik berpihak kepada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Midgley (2020) menegaskan bahwa pembangunan sosial (*social development*) harus mengintegrasikan dimensi ekonomi dan sosial agar pemberdayaan tidak berhenti pada tataran mikro (individu atau komunitas), tetapi juga berdampak pada perubahan struktural di tingkat makro. Ia memperkenalkan konsep *developmental social policy*, yaitu pendekatan kebijakan yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai komponen strategis dalam pembangunan nasional. Pendekatan ini menolak dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, dengan argumen bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam model ini, kebijakan sosial tidak sekadar menjadi instrumen kompensasi bagi kelompok miskin, tetapi menjadi instrumen produktif yang memperkuat kapasitas manusia, solidaritas sosial, dan inklusi ekonomi.

Pendekatan *developmental social policy* menuntut adanya perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan publik. Negara tidak lagi dilihat hanya sebagai penyedia bantuan sosial (*welfare provider*), melainkan sebagai fasilitator perubahan sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Sosiologi memberikan kontribusi penting dengan membongkar bagaimana relasi kekuasaan, kelas sosial, dan kepentingan ekonomi sering kali menentukan arah kebijakan. Melalui analisis sosiologis, pekerja sosial dan

pembuat kebijakan dapat memahami bahwa kemiskinan, ketimpangan, dan marjinalisasi bukan semata akibat kegagalan individu, melainkan hasil dari struktur sosial yang tidak adil. Dengan pemahaman ini, kebijakan sosial dapat diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan tersebut, bukan sekadar mengelolanya.

Dominelli (2022) memperluas diskursus ini dengan menambahkan dimensi *eco-social*, yang menekankan bahwa kebijakan sosial harus mempertimbangkan aspek keadilan lingkungan. Dalam konteks global yang ditandai oleh krisis iklim, bencana ekologis, dan eksploitasi sumber daya alam, kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan ekosistem. Dominelli memperkenalkan konsep *eco-social work*, yakni pendekatan yang mengintegrasikan keadilan sosial dan keadilan ekologis melalui kerja sosial yang berorientasi pada keberlanjutan. Dalam pendekatan ini, pekerja sosial berperan tidak hanya dalam memperkuat kapasitas individu dan komunitas menghadapi risiko sosial, tetapi juga dalam membangun kesadaran ekologis, solidaritas lintas generasi, serta tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.

Dalam konteks perubahan iklim dan degradasi lingkungan, kelompok rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah rawan banjir, petani kecil yang bergantung pada pola cuaca, atau masyarakat adat yang kehilangan lahan akibat ekspansi industri adalah contoh konkret dari hubungan antara ketimpangan sosial dan krisis ekologis. Oleh karena itu, integrasi antara sosiologi lingkungan dan pekerjaan sosial menjadi penting untuk mengembangkan konsep resiliensi ekologis yakni kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan bertahan terhadap perubahan lingkungan dengan memanfaatkan solidaritas sosial dan sistem dukungan komunitas.

Resiliensi ekologis tidak hanya berbicara tentang kemampuan bertahan hidup, tetapi juga tentang kemampuan kolektif untuk mengubah sistem yang merusak. Pekerja sosial yang berorientasi *eco-social* dapat berperan dalam memfasilitasi adaptasi komunitas terhadap perubahan iklim, misalnya melalui pelatihan pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, atau pendidikan lingkungan bagi anak muda. Dengan demikian, pekerjaan sosial berkontribusi pada reformasi struktural yang tidak hanya mengatasi ketimpangan sosial, tetapi juga memperkuat keberlanjutan ekologis.

Dalam konteks Indonesia, dimensi struktural ini menjadi semakin relevan. Negara dengan struktur sosial yang majemuk dan ketimpangan regional yang tinggi membutuhkan kebijakan sosial yang mampu menghubungkan antara pemberdayaan lokal dan reformasi nasional. Studi oleh Dewi Kurniasih & Maisya Chaluela Anjani (2025) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pedesaan sangat bergantung pada kualitas relasi sosial, kompetensi pekerja sosial, dan keselarasan moral dengan nilai-nilai komunitas lokal. Penelitian mereka menegaskan bahwa ketika pekerja sosial memiliki kapabilitas reflektif dan modal sosial yang kuat, mereka mampu bertindak sebagai jembatan antara struktur kebijakan publik dan realitas komunitas rentan. Dengan demikian, pekerja sosial tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga penghubung antara dunia kebijakan (struktur) dan dunia kehidupan sosial masyarakat (agensis).

Kajian tersebut memperlihatkan bahwa transformasi sosial dan ekonomi di pedesaan tidak mungkin tercapai melalui kebijakan yang bersifat *top-down* semata. Pekerja sosial yang memahami dinamika sosial lokal dapat membantu menyesuaikan kebijakan agar lebih relevan dengan konteks budaya, ekonomi, dan nilai komunitas. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi tidak cukup dengan memberikan modal finansial, tetapi juga harus memperkuat kepercayaan sosial (*social trust*), jaringan solidaritas, dan kapasitas organisasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, kebijakan sosial dapat menjadi instrumen yang menumbuhkan *ownership* dan keberlanjutan di tingkat akar rumput.

Kebijakan sosial yang efektif harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pekerja sosial profesional, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pendekatan kolaboratif semacam ini memungkinkan terciptanya ekosistem sosial yang mendukung transformasi struktural secara berkelanjutan. Penting untuk menyoroti peran pendidikan dan riset sosial dalam mendukung reformasi kebijakan. Institusi akademik memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan pengetahuan kritis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan sosial dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based policy*). Melalui integrasi antara teori sosiologis dan praktik kesejahteraan sosial, riset dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap kebijakan yang tidak adil, serta sebagai inspirasi bagi model pembangunan yang lebih inklusif.

Integrasi sosiologi dan kesejahteraan sosial di tingkat struktural bukan hanya tentang bagaimana kebijakan dirancang, tetapi juga bagaimana ia diimplementasikan dan dimonitor secara partisipatif. Reformasi kebijakan yang sejati adalah proses sosial yang melibatkan perubahan dalam nilai, institusi, dan relasi kekuasaan. Dalam konteks ini, pekerja sosial berperan penting sebagai agen penghubung antara masyarakat sipil dan negara, yang menjembatani aspirasi warga dengan mekanisme kebijakan publik.

Transformasi struktural hanya dapat dicapai ketika kebijakan sosial berpijak pada prinsip-prinsip keadilan sosial, solidaritas ekologis, dan partisipasi demokratis. Integrasi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial memberikan fondasi teoretis sekaligus arah praksis bagi terciptanya sistem kesejahteraan yang tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menata ulang struktur sosial agar lebih adil dan berkelanjutan. Dengan cara ini, kesejahteraan sosial bukan sekadar tujuan, melainkan proses kolektif menuju masyarakat yang manusiawi, setara, dan berdaya.

### **3.2.4. Dimensi Epistemologis: Menuju Paradigma Sosial yang Kolaboratif**

Secara epistemologis, integrasi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial merepresentasikan pergeseran paradigma besar dalam ilmu sosial kontemporer dari pendekatan linear, positivistik, dan hierarkis menuju pendekatan kolaboratif, reflektif, dan transformatif. Pergeseran ini lahir dari kesadaran bahwa realitas sosial bersifat kompleks, dinamis, dan tidak dapat dipahami melalui satu disiplin atau metode tunggal. Dalam konteks ini, integrasi epistemologis tidak sekadar menyatukan dua bidang ilmu, tetapi menciptakan cara berpikir baru yang lebih dialogis, lintas-disiplin, dan berbasis pada pengalaman praksis sosial.

Banks et al. (2021) menyebut pergeseran ini sebagai *reflexive integration*, yakni proses dimana pengetahuan ilmiah dan praktik sosial saling memperkaya dan saling mengoreksi. Dalam kerangka ini, teori tidak lagi diposisikan sebagai seperangkat rumus yang kaku dan universal, melainkan sebagai panduan dinamis yang terus berkembang melalui refleksi atas pengalaman lapangan. Pekerja sosial dan sosiolog sama-sama dilihat sebagai *co-producers of knowledge* pencipta pengetahuan bersama yang terlibat secara aktif dalam proses sosial, bukan pengamat yang berdiri di luar realitas.

Paradigma reflektif ini menuntut adanya keterbukaan epistemologis, yaitu kesediaan untuk mendialogkan teori dengan praktik, serta ilmu akademik dengan pengetahuan lokal masyarakat. Dalam tradisi positivistik, ilmu cenderung melihat masyarakat sebagai objek penelitian yang harus diukur dan dikontrol. Namun dalam paradigma kolaboratif, masyarakat dipandang sebagai subjek pengetahuan yang memiliki pengalaman, nilai, dan kearifan yang sah. Pengetahuan ilmiah yang dihasilkan melalui kolaborasi semacam ini bukan hanya lebih kontekstual, tetapi juga memiliki legitimasi sosial, karena lahir dari proses dialog dan partisipasi bersama warga.

Cox & Pawar (2022) memperkuat gagasan ini dengan menegaskan bahwa paradigma integratif menjadi sangat penting dalam menghadapi kompleksitas isu global yang saling berkelindan, seperti kemiskinan multidimensi, migrasi internasional, konflik sosial, perubahan iklim, hingga disrupsi digital. Mereka menyoroti bahwa pekerja sosial modern harus memahami kerentanan sosial bukan sekadar sebagai kondisi lokal atau personal, tetapi sebagai konsekuensi dari struktur ekonomi-politik global yang tidak adil. Misalnya, migrasi tenaga kerja, ketimpangan digital, dan kerentanan ekologis tidak dapat dipahami tanpa melihat bagaimana sistem kapitalisme global, neoliberalisme, dan kebijakan perdagangan internasional membentuk distribusi peluang dan risiko di masyarakat.

Integrasi sosiologi dan kesejahteraan sosial membantu memperluas horizon analisis pekerja sosial dari ranah mikro ke makro, dari lokal ke global. Sosiologi memberikan perangkat analisis untuk memahami struktur kekuasaan dan relasi sosial lintas batas negara, sedangkan kesejahteraan sosial menawarkan kerangka etik dan strategi intervensi untuk mengurangi dampak ketimpangan global tersebut di tingkat komunitas. Dengan demikian, paradigma kolaboratif ini berperan penting dalam melahirkan praktik sosial yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global, tanpa kehilangan akar lokalnya.

Paradigma integratif juga menuntut pendekatan metodologis yang bersifat interdisipliner dan reflektif. Dalam riset sosial, hal ini tampak pada berkembangnya metode *participatory action research* (PAR), *critical ethnography*, atau *co-design research*, di mana peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga berkolaborasi dengan komunitas untuk memahami dan mengubah realitas sosial bersama. Melalui proses partisipatif ini, riset menjadi wadah pembelajaran sosial yang mempertemukan ilmu akademik dengan pengetahuan pengalaman (*experiential knowledge*).

Pendekatan reflektif ini memiliki implikasi etis yang signifikan. Ia menolak relasi pengetahuan yang hierarkis di mana akademisi dianggap lebih tahu daripada masyarakat dan menggantinya dengan relasi epistemik yang setara. Dalam konteks kesejahteraan sosial, hal ini berarti bahwa pekerja sosial tidak hanya “menerapkan teori” kepada klien, tetapi juga belajar dari pengalaman hidup klien sebagai sumber pengetahuan yang sah. Dengan demikian, praktik sosial menjadi ruang dialog yang saling memperkaya antara teori, kebijakan, dan pengalaman kehidupan nyata.

Dalam konteks Indonesia, paradigma kolaboratif ini sangat relevan untuk memperkuat ilmu sosial yang berakar pada realitas lokal. Selama ini, banyak kebijakan sosial dan program pemberdayaan di Indonesia masih berlandaskan model impor yang tidak selalu sesuai dengan nilai budaya dan struktur sosial masyarakat setempat. Melalui pendekatan epistemologis yang reflektif, pengetahuan lokal seperti tradisi musyawarah, gotong royong, dan solidaritas komunal dapat diintegrasikan ke dalam teori dan praktik kesejahteraan sosial modern. Proses ini tidak hanya menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat identitas sosial dan budaya masyarakat.

Integrasi epistemologis ini juga menjadi dasar bagi pembangunan ilmu sosial yang dekolonial, yakni upaya membebaskan pengetahuan dari dominasi perspektif Barat dan membuka ruang bagi pengetahuan dari Selatan Global, termasuk Indonesia. Pendekatan kolaboratif memungkinkan lahirnya teori sosial yang berbasis pada pengalaman masyarakat sendiri—teori yang tidak sekadar menjelaskan, tetapi juga memberdayakan. Dalam hal ini, pekerja sosial dan sosiolog berperan sebagai *knowledge activists*, yaitu pelaku sosial yang menggunakan pengetahuan untuk menciptakan perubahan dan keadilan sosial.

Epistemologi kolaboratif juga mengandung dimensi moral dan politik. Pengetahuan tidak lagi dianggap netral, tetapi selalu memiliki implikasi terhadap kekuasaan dan perubahan sosial.

Setiap teori dan praktik sosial membawa nilai tertentu: apakah ia memperkuat status quo atau mendorong pembebasan. Karena itu, pekerja sosial dan akademisi dituntut untuk mengembangkan refleksi etis yang mendalam terhadap peran mereka dalam sistem sosial. Dengan kesadaran reflektif, ilmu sosial dapat berfungsi sebagai instrumen emansipasi, bukan sekadar alat reproduksi pengetahuan yang elitis.

Pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi antara sosiologi dan kesejahteraan sosial pada tataran epistemologis tidak hanya memperkuat fondasi teoritis dan metodologis dalam studi pemberdayaan kelompok rentan, tetapi juga memperkaya praktik sosial agar lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Paradigma kolaboratif membuka ruang bagi lahirnya bentuk-bentuk baru pengetahuan sosial pengetahuan yang hidup, terbuka terhadap dialog, dan berorientasi pada perubahan.

Dengan berpijak pada prinsip reflektivitas, partisipasi, dan keadilan, integrasi epistemologis ini dapat menjadi landasan bagi ilmu sosial abad ke-21 yang lebih humanis dan relevan dengan tantangan zaman. Ia menempatkan manusia bukan sekadar sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek pengetahuan dan agen perubahan sosial. Di sinilah kesejahteraan sosial dan sosiologi bertemu: dalam komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang sadar, kritis, dan berdaya dalam menentukan masa depannya sendiri.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil kajian literatur komprehensif menunjukkan bahwa integrasi antara perspektif sosiologi dan kesejahteraan sosial memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat strategi pemberdayaan kelompok rentan. Integrasi ini membentuk pendekatan yang multi-level, mencakup analisis makro terhadap struktur sosial serta intervensi mikro dalam praktik kesejahteraan sosial.

Pertama, dari sisi sosiologis, pemahaman terhadap faktor struktural seperti stratifikasi sosial, gender, dan eksklusi sosial menjadi dasar penting dalam membaca akar ketidaksetaraan. Sosiologi membantu pekerja sosial memahami bahwa kerentanan tidak muncul secara individual, tetapi merupakan hasil dari relasi kuasa, norma sosial, dan kebijakan publik yang tidak inklusif. Pendekatan ini memperluas perspektif pekerja sosial agar tidak hanya fokus pada gejala, tetapi juga pada penyebab sistemik yang menciptakan kerentanan (Llorente-Marrón et al., 2020; Mullaly & West, 2021; Healy, 2021).

Kedua, dari sisi kesejahteraan sosial, pemberdayaan (*empowerment*) dipandang sebagai strategi transformatif yang menggabungkan dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi. Pekerja sosial yang efektif harus mampu memfasilitasi partisipasi aktif penerima manfaat, meningkatkan kapasitas komunitas, serta mendorong kemandirian kolektif. Melalui integrasi dengan teori sosiologi, praktik pemberdayaan menjadi lebih kontekstual dan adaptif terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat (Saleebey, 2020; Ife, 2021; López & Martínez, 2021).

Ketiga, model integrasi interdisipliner yang dihasilkan menggabungkan kekuatan analisis struktural sosiologi dengan intervensi empatik kesejahteraan sosial. Model ini menghasilkan *social empowerment framework* yang berorientasi pada perubahan sistem sosial, peningkatan daya tahan komunitas, dan penguatan modal sosial. Dalam konteks Indonesia, hal ini tampak relevan untuk memperkuat kebijakan sosial seperti *Desa Inklusif*, *Program Keluarga Harapan (PKH)*, serta inisiatif *Pemberdayaan Sosial Berbasis Komunitas*.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa integrasi perspektif sosiologi dan kesejahteraan sosial tidak hanya memperluas pemahaman ilmiah terhadap fenomena kerentanan sosial, tetapi juga memperkaya praktik intervensi sosial yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek perubahan sosial yang aktif dan berdaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R., Dominelli, L., & Payne, M. (2021). *Empowerment, Participation, and Social Work Practice*. <https://doi.org/10.1177/1468017320987622>
- Agusman, M. F., & Hidayat, L. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dalam Pemenuhan Hak Disabilitas*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan. <https://edukatif.org/edukatif/article/view/5675>
- Banks, S., Westoby, P., & Burkett, I. (2021). *Community Development for Social Change*. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsab013>
- Barry, E. S., Merkebu, J., & Varpio, L. (2022). *Understanding state-of-the-art literature reviews*. *Journal of Graduate Medical Education*, 14(6), 659–662. <https://doi.org/10.4300/JGME-D-22-00705.1>
- Barry, E. S., Merkebu, J., & Varpio, L. (2022). *State-of-the-art literature review methodology: A six-step approach for knowledge synthesis*. *Perspectives on Medical Education*, 11, 281–288. <https://doi.org/10.1007/s40037-022-00725-9>
- Bauman, Z. (2020). *Liquid Modernity Revisited: Social Uncertainty and Vulnerability*. Routledge.
- Beck, U. (2020). *Risk Society and the New Social Vulnerability*. *Social Indicators Research*, 150(2), 215–230. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02310-5>
- Bourbeau, P. (2020). *Resilience and Vulnerability in Global Contexts*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/S0260210520000205>
- Claridge, T. (2021). *Social Capital and Resilience in Communities*. *Social Sciences*, 10(4), 4383. <https://doi.org/10.17645/socsci.v10i4.4383>
- Cox, D., & Pawar, M. (2022). *International Social Work: Issues, Strategies, and Programs*. <https://doi.org/10.4135/9781071838738>
- Crenshaw, K. (2020). *On Intersectionality and Social Justice*. *Columbia Law Review*.
- Damayanti, N., et al. (2025). *Middle-Class Squeeze and Vulnerability in Indonesia*. *E-Journal Universitas Airlangga*. <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/73728>
- Dominelli, L. (2022). *Eco-Social Work and Climate Justice*. <https://doi.org/10.1177/00208728221086751>
- Ferguson, I., & Lavalette, M. (2020). *Critical Social Work and the New Social Order*. <https://doi.org/10.1332/204986020X15913660325913>
- Fraser, N. (2021). *Redistribution and Recognition in Global Justice. Theory, Culture & Society*.
- Giddens, A. (2021). *Modernity and Self-Identity in the Age of Globalization*. Polity Press.
- Healy, L. (2021). *Human Rights-Based Social Work and Policy Integration*. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab007>
- Healy, L., & Link, R. (2021). *Human Rights and Social Work Practice*. *British Journal of Social Work*. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab007>
- Ife, J. (2021). *Community-Based Social Work and Local Empowerment*. <https://doi.org/10.4324/9781003155213>
- Karabanow, J., Kidd, S., & Hughes, J. (2022). *Relational Empowerment Framework in Social Work Practice*. *Social Work Education*, 41(4), 555–570. <https://doi.org/10.1080/02615479.2022.2030157>
- Llorente-Marrón, M., et al. (2020). *Gender and Social Vulnerability in Natural Disasters*. MDPI. <https://doi.org/10.3390/socsci9070125>
- Llorente-Marrón, M., et al. (2020). *Social Vulnerability and Gender Inequality in Disaster Contexts*. *Sustainability*, 12(9), 3574. <https://doi.org/10.3390/su12093574>

- López, M., & Martínez, C. (2021). *Social Work, Empowerment, and Structural Inequality*. <https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1882574>
- McLaughlin, K., & Gray, M. (2022). *Digital Inequality and Social Work: Understanding the New Divide*. *British Journal of Social Work*, 52(3), 789–805. <https://doi.org/10.1177/14680173211056711>
- Midgley, J. (2020). *Social Development: Theory and Practice*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197518390.001.0001>
- Mullaly, B., & West, J. (2021). *Challenging Oppression and Confronting Privilege*. <https://doi.org/10.4324/9781003058798>
- Nguyen, H., & Parker, S. (2023). *Digital Empowerment and Social Inclusion in Social Work*. *Children and Youth Services Review*. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107654>
- Nguyen, H., & Parker, S. (2023). *Digital Social Work and Empowerment*. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107654>
- Nurkhalim, R. F. (2022). *Program Keluarga Harapan: A Conditional Cash Transfer to Increase Prenatal Visits and Improve Maternal and Child Health in Indonesia*. *Journal/report accessible via PubMed Central*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9627763/>
- Saleebey, D. (2020). *Strengths-Based Social Work Practice*. <https://doi.org/10.4324/9780429261905>
- Saleebey, D. (2020). *The Strengths Perspective in Social Work Practice*. *Qualitative Social Work*. <https://doi.org/10.1177/1049731520931300>
- SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel). *Dokumentasi program RINDI / unit layanan disabilitas (laporan program dan profil lembaga)*. <https://sigab.org/profil-lembaga/>
- Siddaway, A. P., Wood, A. M., & Hedges, L. V. (2019). *How to do a systematic review: A best practice guide for conducting and reporting narrative reviews, meta-analyses, and meta-syntheses*. *Annual Review of Psychology*, 70, 747–770. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102803>
- Sururi, A. (2024). *Social Capacity, Social Innovation and Social Participation as Principles of Social Worker Advocacy in Support of Sustainable Development*. *Journal of Social Work & Social Welfare Policy*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.33790/jswwp1100121>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). *Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review*. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). *Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study*. *Nursing & Health Sciences*, 15(3), 398–405. <https://doi.org/10.1111/nhs.12048>
- World Bank. *Program Keluarga Harapan: Impact evaluation of Indonesia's pilot household conditional cash transfer program (report)*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/589171468266179965/program-keluarga-harapan-impact-evaluation-of-indonesias-pilot-household-conditional-cash-transfer-program>